



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



HANDBOOK

DUTA TRANSFORMASI

KELEMBAGAAN

TAHUN 2022



TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Daftar Isi

Daftar Isi

Hal i

Kata Pengantar

Hal iii

Sekapur Sirih

Hal iv

1 Transformasi Kelembagaan

- Apa Itu Transformasi Kelembagaan?
Hal. 2
- Mengapa Kementerian Keuangan Harus Bertransformasi?
Hal. 3
- Periodisasi Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan
Hal. 4

2 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan

- Apa Itu Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan?
Hal. 8
- Penyusunan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan
Hal. 9
- Bagian-Bagian dalam Dokumen IS Kementerian Keuangan
Hal. 9
- IS Kementerian Keuangan Tahun 2022
Hal. 10

3 *Quickwins* **DJPb**

- Apa Itu *Quickwins* DJPb?
Hal. 12
- Tata Kelola *Quickwins* DJPb
Hal. 13
- *Quickwins* DJPb tahun 2022
Hal. 15

4 **Duta** **Transformasi**

- Apa Itu Duta Transformasi?
Hal. 24
- Tugas Duta Transformasi
Hal. 25
- Program Kerja Duta Transformasi
Hal. 25
- Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022
Hal. 26

5 **Suplemen**

- Supelemen Proposal Program Kerja
Hal. 36

FAQ

Hal 43

Daftar Pustaka

Hal 45

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan *Handbook* Duta Transformasi Kelembagaan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Periode Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sejak tahun 2019 telah memasuki tahap Transformasi Digital yang bertujuan untuk mengubah *mindset* dan budaya kerja sehingga relevan dengan perkembangan teknologi dan pola aktivitas masyarakat di era digital. Seiring dengan perkembangan di segala bidang, Kementerian Keuangan dituntut untuk senantiasa responsif dalam menjalankan fungsi strategisnya.

Dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan, dukungan seluruh elemen Kementerian Keuangan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilannya. Melalui program agen perubahan yaitu Duta Transformasi, diharapkan manajemen perubahan dalam kerangka RBTK Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara luas dan optimal.

Salah satu peran kunci Duta Transformasi adalah sebagai resonan sekaligus katalisator manajemen perubahan RBTK Kementerian Keuangan. Duta Transformasi memiliki peranan penting dalam mendukung Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Duta Transformasi haruslah memiliki bekal pemahaman yang baik terhadap Transformasi Kelembagaan dan perannya sebagai agen perubahan.

Adanya handbook ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para Duta Transformasi maupun seluruh insan perbendaharaan serta semua pihak yang berkepentingan dalam mendukung pelaksanaan Transformasi Kelembagaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ludiro
Ketua PMO DJPb



Sekapur Sirih

Salam Transformasi untuk seluruh Duta Transformasi!

Sesuai dengan tujuan Transformasi Kelembagaan yaitu peningkatan kualitas organisasi dan penyelarasan struktur organisasi, perbaikan proses bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, serta perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan. Sebuah perubahan merupakan suatu keniscayaan, sehingga sebagai bagian dari Kementerian Keuangan sudah kehendaknya mendukung Program Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan.

Duta Transformasi yang merupakan bagian dari manajemen perubahan (*Change Agent*) berperan sebagai perpanjangan tangan bagi *Project Management Office* serta *Central Transformation Office*. Jumlah Duta Transformasi yang sangat luar biasa, yaitu pada tahun 2022 ini terdapat 42 *Change Agent* dan 232 *Lighthouse*, tentu saja dapat menjadi mesin penggerak untuk menggaungkan Transformasi Kelembagaan serta mensukseskan Program Transformasi Kelembagaan. Peran strategis Duta Transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi mandat yang istimewa untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepada seluruh Duta Transformasi, semangat dalam menjalankan amanah sebagai Duta Transformasi. Kita mampu jika kita mau dan jadilah Duta Transformasi yang produktif dan menebar manfaat dimanapun berada.

Rd. Yen Yen Nuryeni
Kalakhar PMO DJPb



Bagian

1

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN



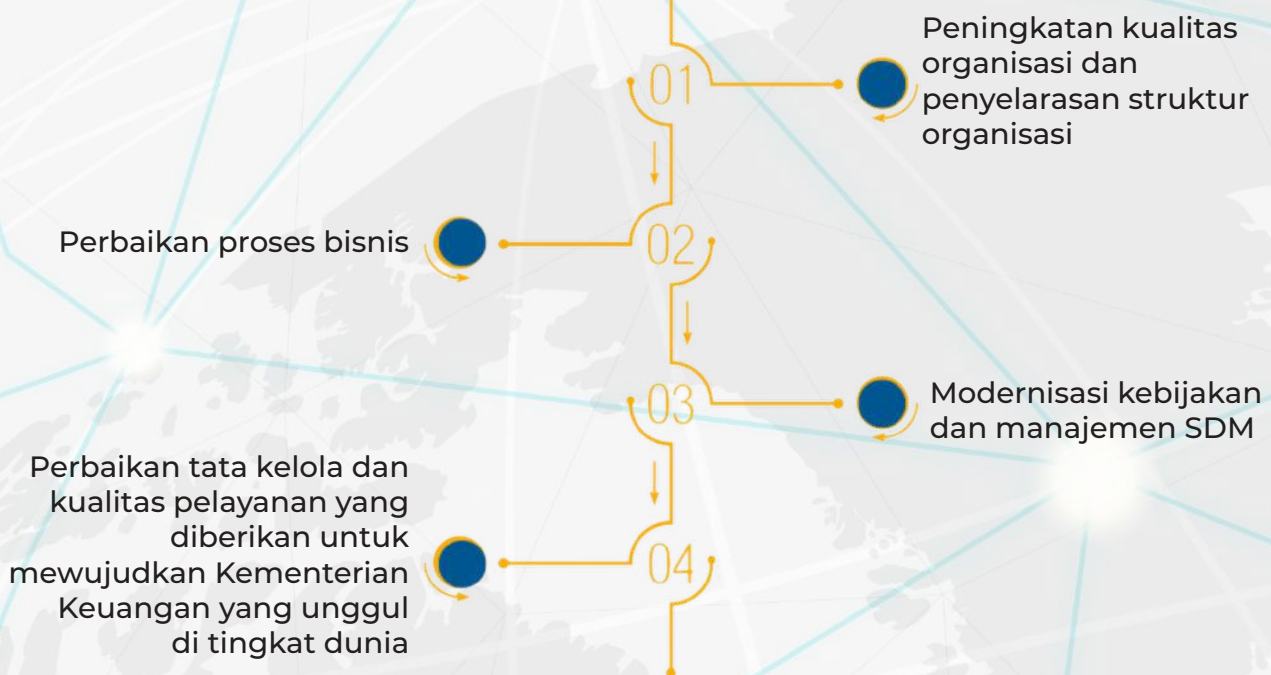
APA ITU TRANSFORMASI KELEMBAGAAN?

Transformasi berasal dari bahasa Inggris “*transform*” yang artinya mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik.

INFORMATION

Transformasi Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tujuan Transformasi Kelembagaan



FUN FACT



Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan dikoordinir oleh **Central Transformation Office (CTO)** yang bertugas untuk memastikan, mengawal dan mendorong implementasi inisiatif-inisiatif strategis yang telah ditetapkan dalam cetak biru program Transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian Keuangan.

MENGAPA KEMENKEU HARUS BERTRANSFORMASI ?

INTERNAL DRIVE



EXTERNAL DRIVE



- Tuntutan Masyarakat
- Transparansi
- Pencegahan Korupsi
- Perkembangan Teknologi 4.0



Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis

PERIODE TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN



Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Periode I (2002-2006)

Periode pertama transformasi kelembagaan dimulai pada tahun 2002 sampai dengan 2006. Periode I ditandai dengan adanya reformasi pengelolaan keuangan negara melalui penerbitan 3 UU terkait Keuangan Negara (UU17/2003, UU1/2004, UU 15/2004), pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dan pembentukan *Large Tax Office* sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan tahap I.



Reformasi Birokrasi Secara Masif Periode II (2007-2012)

Selanjutnya pada tahun 2007 (periode II) Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Birokrasi secara masif yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama.

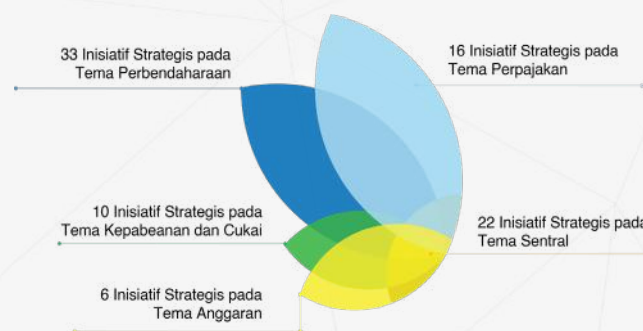
Pilar Organisasi, antara lain melalui penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya.

Pilar Proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan

Standar Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* serta pembangunan berbagai sistem aplikasi *e-government*. Pilar Sumber Daya Manusia, antara lain melalui peningkatan disiplin, pembangunan *assessment center*, diklat berbasis kompetensi, pelaksanaan *merit system*, penataan sumber daya manusia, pembangunan (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan penerapan *reward and punishment* secara konsisten.

Selanjutnya pada tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan diintegrasikan dengan Reformasi Birokrasi Nasional yang dilakukan melalui 8

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Periode III (2013-2016)



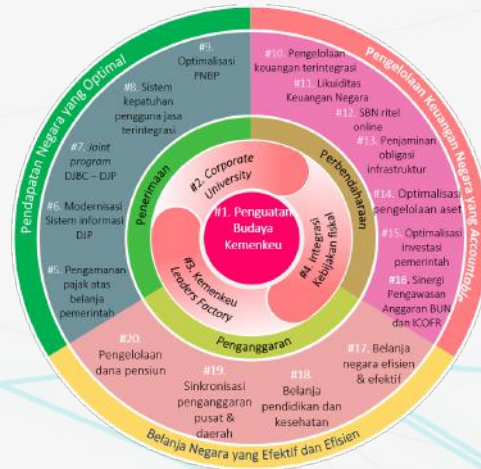
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Periode ketiga transformasi kelembagaan dimulai tahun 2013 sampai dengan 2016. Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan memandang perlu untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu Program Transformasi Kelembagaan untuk dapat melakukan perbaikan secara lebih masif, integral dan terstruktur.

Sebagai pernyataan komitmen dan kesungguhan Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Program Transformasi Kelembagaan, maka diwujudkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang memuat 87 inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang terbagi dalam 5 tema yaitu tema perpajakan, tema penganggaran, tema perbendaharaan, tema sentral, serta tema kepabeanaan dan cukai dan 9 arah kebijakan Transformasi Organisasi serta penetapan visi Kemenkeu yaitu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

20 Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Periode IV (2016-2018)

Periode keempat transformasi kelembagaan dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Pada periode IV adanya pergantian menteri keuangan dari semula Bapak Bambang P.S. Brojonegoro menjadi Ibu Sri Mulyani Indrawati membuat munculnya Inisiatif Baru dengan salah satu kriteria “*Connecting the Dots*” yang artinya diperlukannya sinergi antar unit eselon I atau K/L penetapan 20 inisiatif baru dalam rangka penguatan implementasi Program RBTK Kementerian Keuangan.



Berdasarkan kriteria tersebut, lahirlah 20 inisiatif baru Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang ditetapkan dalam KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan KMK Nomor 59/KMK.01/2018. Penetapan 20 inisiatif baru ini dilaksanakan dalam rangka penguatan implementasi Program RBTK Kementerian Keuangan.

Transformasi Digital Current Phase (2019-sekarang)



Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi yang menjadi periode V dari program reformasi Kemenkeu. *Current Phase* dimulai sejak tahun 2019 dan berlangsung hingga sekarang dengan pelaksanaan Transformasi Digital.

Dalam Transformasi Digital, Kemenkeu menggunakan *Enterprise Architecture* (EA) sebagai *tool* utama menuju Kemenkeu modern yang berbasis digital. Capaian utama Transformasi Digital yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah melalui 11 inisiatif strategis yang selanjutnya berkembang menjadi 15 Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024.

Bagian

2

INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN



APA ITU INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN?

Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis adalah inisiatif-inisiatif yang bersifat strategis, yang disusun dan perlu dilaksanakan untuk mencapai target. Inisiatif strategis adalah rencana komprehensif yang ditetapkan organisasi untuk mencapai tujuan strategis atau visi jangka panjang untuk perbaikan.

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan

Inisiatif strategis Kementerian Keuangan (disingkat IS Kemenkeu, sebelumnya disingkat IS RBTK) adalah proyek strategis Kemenkeu yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran strategis Kemenkeu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Kemenkeu dalam *Leaders Offsite Meeting* (LOM). IS Kemenkeu mengacu kepada Roadmap Reformasi Birokrasi, Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan, dan Program RBTK Kemenkeu.





PENYUSUNAN IS KEMENKEU

Penyusunan IS Kemenkeu bisa bersifat *top down* (arahan pimpinan) maupun *bottom up* (hasil kajian, survei, aspirasi unit/ pegawai). Dari manapun asalnya, cikal bakal IS ini dibahas melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Perumusan konsep inisiatif oleh CTO dan *Project Management Office* (PMO)
2. *One-on-One* pembahasan konsep charter oleh Pejabat Eselon I dengan Kalakhar CTO
3. Pengambilan keputusan berdasarkan arahan Menkeu dan Wamenkeu pada LOM yang dihadiri seluruh pimpinan Kemenkeu
4. Pendetailan (minilab) *charter* ke dalam *end state*, rencana kerja, kriteria Penyelesaian, serta *work breakdown structure* oleh PIC CTO, PMO, dan tim teknis pelaksana IS.

BAGIAN-BAGIAN DALAM DOKUMEN IS KEMENKEU



1

Charter

Charter merupakan *executive summary* dari proyek IS Kemenkeu yang ditetapkan dalam KMK. *Charter* berisi beberapa bagian rinci seperti latar belakang, *key milestone*, *output*, *outcome*, dst.

2

End State

End State merupakan target keadaan yang akan dicapai setelah IS selesai dilaksanakan (*after*), dibandingkan dengan keadaan saat ini atau sebelum IS (*before*).

3

Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan cara mencapai tujuan/ output yang dirinci dalam beberapa *milestone* serta dilengkapi dengan jadwal (*Gantt Chart*) dalam satuan bulan serta keterangan penanggung jawab baik itu *Unit In Charge* (UIC) Utama maupun UIC pendukung

4

Kriteria Penyelesaian

Keluaran dari *milestone* yang mendukung tercapainya *output/outcome*, baik dinyatakan dalam sifat kualitas ataupun kuantitas

5

Work Breakdown Structure

Pendetailan setiap *milestone* rencana kerja sampai dengan level aktivitas



IS KEMENKEU 2022

Pada tahun 2022 ini ditetapkan 41 IS Kemenkeu yang terdiri atas:

1. 6 IS Tema Sentral
2. 1 IS Tema Fiskal
3. 4 IS Tema Penerimaan
4. 2 IS Tema Belanja
5. 9 IS Tema PKNP (Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan)
6. 19 IS Data Analitik

Bagian

3

QUICKWINS

DJPB

APA ITU QUICKWINS DJPb?

Quickwins atau program percepatan merupakan suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun, memberikan manfaat yang dapat dirasakan, serta mendukung IS Kemenkeu.

Quickwins juga diartikan sebagai suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. *Quickwins* merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama, baik secara eksternal maupun internal. *Quickwins* diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri yang untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan *image* positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi.



Latar Belakang

Quickwins ditetapkan untuk mengawal program Transformasi Kelembagaan oleh DJPb sejak tahun 2015.

Transformasi berskala besar adalah suatu kegiatan yang kompleks, sehingga sering kali meliputi sejumlah besar ragam inisiatif di seluruh tingkatan yang terdapat di dalam suatu organisasi. Program transformasi yang berhasil pasti terwujud melalui adanya keseimbangan antara pengelolaan inisiatif bisnis inti dan pengelolaan dinamika organisasi. Oleh karena itu, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Quickwins* dirumuskan setiap tahun serta dicantumkan pada **Treasury Charter** yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan *Unit in Charge* (UIC) pada lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Quickwins* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berjalan selama sewindu yakni dari 2015 sampai 2022.



Treasury Charter

[CLICK HERE!](#)

QUICKWINS 2015-2022



TATA KELOLA *QUICKWINS*



PENGUSULAN

Oleh masing-masing unit Eselon II dan non Eselon kepada Ketua PMO

KRITERIA



Selaras Inisiatif Strategis maupun IKU



Terobosan proses bisnis dan bersifat kreatif & inovatif



Mendukung program RBTK



Memiliki milestone dan bobot pencapaian



Memiliki dampak secara nasional



Bukan duplikasi *quickwins* sebelumnya



Target menantang namun *achievable*



Dapat dicapai dalam waktu 1 tahun



PENETAPAN

- Usulan *Quickwins* direviu oleh tim PMO
- Usulan yang tidak sesuai dibahas bersama antara unit Eselon II dan PMO
- Usulan yang disetujui, dibahas di BoD yang dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan dan ditetapkan dalam *Treasury Charter*
- *Treasury Charter* ditandatangani secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh insan perbendaharaan



PERUBAHAN

(*Change request*) Perubahan manual implementasi *quickwins* dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan unit Eselon II, dianalisis oleh tim PMO & disetujui oleh ketua PMO



MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- Laporan capaian *Quickwins* disampaikan oleh UIC maksimal tanggal 10 setiap bulannya
- Monitoring & evaluasi secara bulanan dengan *one on one meeting*
- Progres capaian dipaparkan kepada BoD setiap triwulan
- Laporan capaian *Quickwins* disampaikan secara periodik (bulanan) kepada pimpinan



PENYELESAIAN

Quickwins dinyatakan selesai oleh pimpinan unit Eselon II dengan melampirkan:

- Surat Pernyataan Penyelesaian
- Laporan Penyelesaian *Quickwins*
- Dokumen pendukung yang menunjukkan terpenuhinya *acceptance criteria*

QUICKWINS DJPB 2022

No	Quickwins	UIC
1	<i>Automatic Business Intelligence Dashboard</i>	Setditjen
2	Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital	Dit. PA
3	Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum	Dit. PKN & Dit. SITP
4	Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)	Dit. SMI
5	<i>Early Warning System</i> : Pengukuran Kemampuan Debitur (BUMN & Pemda) untuk Membayar Pinjaman	Dit. SMI
6	<i>Maturity Rating</i> Satker BLU	Dit. PPK BLU
7	Sinergi Pembinaan BLUD	Dit. PPK BLU
8	<i>Dashboard Flash Report</i> Transaksi BUN	Dit. APK & Dit. SITP
9	Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI	Dit. APK & Dit. SITP
10	Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)	Dit. SP
11	Pengembangan <i>Treasury Big Data</i>	Dit. SITP
12	Elektronifikasi Transaksi SAKTI	Dit. SITP

1. *Automatic Business Intelligence Dashboard*



AUTOMATIC
business intelligence
dashboard

Penyediaan media bantu bagi pimpinan berdasarkan sumber yang dinamis terkait pengambilan keputusan/kebijakan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan penghapusan BMN serta analisis data secara otomatis terkait realisasi *output* dan belanjanya. Tujuan *Quickwins* ini adalah dalam

rangka transformasi pengolahan data dari manual dan semi manual menjadi otomatis, integrasi dan penguatan sistem perencanaan yang lebih terpadu, memberikan olahan data dan informasi yang menjadi bagian rekomendasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan, menyediakan Informasi strategis realisasi belanja dan kinerja pencapaian *output*, dan digitalisasi pemetaan potensi PNBPN dan *virtual site* gedung dan layout kantor.

Dampak/ Stakeholder

Instansi, pimpinan pusat dan masing-masing kantor vertikal serta para pegawai, selain itu penerima manfaat eksternal antara lain, Ramadan, Rocankeu, DJA, DJKN sampai dengan Itjen

2. Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital



Digitalisasi penyaluran bantuan sosial merupakan modernisasi penyaluran bantuan sosial melalui kanal digital platform untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Kanal digital platform dengan memanfaatkan teknologi QRIS dan *biometric* yang terintegrasi dengan data NIK dalam penyaluran bantuan sosial, dapat memperluas cakupan penerima bantuan sosial dan opsi saluran pembayaran kepada penerima. Tujuan *Quickwins* ini diantaranya adalah penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi; *time and cost saving* melalui simplifikasi proses bisnis terkait administrasi penyaluran bansos; memperluas cakupan penerima bantuan sosial dan menambah opsi saluran pembayaran kepada penerima; meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial tanpa mengurangi sisi akuntabilitas penyaluran bantuan sosial; dan meningkatkan kualitas pelayanan Satker pengelola bantuan sosial kepada masyarakat.

Dampak/ Stakeholder

Dampak dari penambahan kanal penyaluran bantuan sosial ini akan dirasakan oleh:

- Seluruh penerima bantuan sosial secara nasional
- Kementerian/ Lembaga penyalur bantuan sosial
- Kementerian Keuangan
- Perbankan dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di *fintech*

3. Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum



Interoperabilitas Digipay pada bank umum adalah peningkatan kapasitas/ kemampuan Digipay dalam rangka memfasilitasi adanya transaksi antar rekening satker dan vendor penyedia barang/ jasa yang berbeda bank, serta interkoneksi dengan berbagai platform yang ada di internal maupun eksternal Kemenkeu. Interoperabilitas Digipay dilakukan untuk

meningkatkan kapasitas/ kemampuan *platform* dalam rangka akselerasi dan perluasan penggunaan Digipay.

Dampak/ Stakeholder

Interoperabilitas Digipay berdampak sebagai berikut:

- Perluasan cakupan layanan Digipay yang memerlukan adanya penyusunan regulasi dan proses bisnis sekaligus pengembangan aplikasi oleh DJPb
- Penyiapan sistem pembayaran oleh perbankan sebagai fasilitator
- Adanya potensi peningkatan penyediaan barang/ jasa (*supply*) yang harus disiapkan vendor untuk memenuhi peningkatan permintaan akibat perluasan pengguna Digipay
- Adanya biaya (MDR) dalam penggunaan KKP pada Digipay Satu yang harus ditanggung vendor, tidak bisa dibebankan pada APBN
- Adanya biaya yang timbul ketika pembayaran lintas bank
- Adanya biaya MDR yang timbul terkait dengan penggunaan KKP

4. Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)



Tahun 2022 merupakan tahun kedua kelanjutan implementasi Investasi Pemerintah dimana terdapat beberapa target yang akan dicapai antara lain pengajuan usulan anggaran dana investasi pemerintah BUN TA 2023, pengembangan sistem IT Investasi, penetapan BLU Pengelola Dana sebagai OIP. *Quickwins* ini bertujuan untuk membentuk suatu ekosistem Investasi Pemerintah yang semakin berkembang dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dampak/ Stakeholder

- Kementerian Keuangan
- BUMN dan BUMD
- Pemerintah Daerah
- Kementerian Lainnya
- BLU lainnya

5. Early Warning System: Pengukuran Kemampuan Debitur (BUMN & Pemda) untuk Membayar Pinjaman

Dalam rangka meningkatkan tata kelola penerusan pinjaman khususnya untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan gagal bayar debitur, Direktorat SMI bermaksud membangun model prediksi untuk mengukur kemampuan



bayar debitur sebagai upaya dalam menangkap tanda-tanda kesulitan keuangan debitur dan upaya preventif atas kemungkinan kegagalan bayar (*early warning system*). Tujuan dari *Quickwins* ini adalah mengukur kemampuan membayar debitur sebagai *early warning system* mencegah terjadinya kegagalan bayar.

Dampak/ Stakeholder

Melalui *Early Warning System* (EWS) Direktorat SMI diharapkan memiliki cukup waktu dalam memformulasi strategi untuk mencegah terjadinya piutang negara yang berkualitas kurang lancar ataupun macet. Sehingga penerimaan kembali pokok pinjaman dan bunga pinjaman dari debitur dapat dioptimalkan di masa mendatang.

6. Maturity Rating Satker BLU



Badan Layanan Umum (BLU) *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* disusun sebagai perangkat bagi PPKBLU maupun BLU untuk mengukur tingkat maturitas tata kelola BLU pada seluruh aspek organisasi secara komprehensif dan *end-to-end*, di mana *tools* ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta target pada tahun yang bersangkutan.

Tujuan *Quickwins* ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif atas kondisi BLU (*strength* dan *area of improvement*) dalam hal tatakelola (keuangan, layanan, kapabilitas internal, inovasi, lingkungan) masing-masing BLU yang selama ini belum terpotret dari monitoring dan evaluasi, peningkatan tatakelola BLU secara berkelanjutan, dan peningkatan kapabilitas dan tatakelola dari Satker BLU.

Dampak

- Meningkatkan tata Kelola BLU secara berkelanjutan melalui turunan *area of improvement* masing-masing BLU kedalam KPI BLU
- Meningkatkan kualitas layanan BLU kepada masyarakat seiring semakin *mature*-nya tata kelola Satker BLU

Stakeholder

- Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan KL nya pembina teknisnya
- Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan
- Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU

7. Sinergi Pembinaan BLUD



Sesuai dengan amanat UU No 1 tahun 2004 tentang pembinaan Badan Layanan Umum dimana BLUD merupakan salah satu bentuk praktek Badan Layanan Umum di Daerah, maka ranah pembinaannya ada pada Kementerian Keuangan terutama aspek pembinaan perbendaharaannya. Diperlukan sinergi dalam melakukan pembinaan antara Pemda, DJPB,

Tujuan Quickwins ini diantaranya sebagai bentuk pelaksanaan Inisiatif Kemenkeu Kewilayahan yaitu Regional Chief of Economist (RCE), Inisiatif standarisasi pembinaan BLUD secara bertahap, mendapatkan Data keuangan dan layanan BLUD guna bahan evaluasi, sebagai perluasan Tusi pembinaan BLUD di Kanwil yang selama ini belum terlaksana dengan baik, dan peningkatan kualitas layanan pemerintah di daerah melalui peningkatan kualitas BLUD.

Dampak

- Peningkatan peran dan kehadiran DJPB di daerah
- Rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran baik di pusat maupun di daerah
- Meningkatnya sinergi DJPB, Pemda, dan Kemendagri
- Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang lebih baik

Stakeholder

- Pemerintah Daerah
- Kemendagri
- Masyarakat

8. Dashboard Flash Report Transaksi BUN



Dashboard Flash Report Transaksi BUN merupakan menu atau fitur pada OMSPAN yang dapat menampilkan secara cepat laporan manajerial terkait pos-pos penting yang menjadi *highlight* pada LKBUN berikut diagram dan *graphic*-nya. Tujuan *Quickwins* ini diantaranya memudahkan dan mempercepat pimpinan atau manajemen

dalam menyediakan data transaksi BUN untuk kepentingan pengambilan keputusan, bahan monitoring dan evaluasi serta keperluan lainnya dan melengkapi fungsi Modul OMSPAN dalam menghasilkan laporan manajerial yang relevan, akurat, andal, dan cepat.

Dampak/ Stakeholder

- Seluruh Satker (UAKPA)/KPPN (UAKBUN-D)
- UAPPAW/Kanwil DJPb (UAKBUN-W), UAPPA-E1/UAKBUNP
- KL (UAPA)/UA BUN sebagai user
- Direktorat APK sebagai *Admin User*
- Direktorat SITP sebagai pengembang aplikasi

9. Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI



Simplifikasi proses rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan pemanfaatan data transaksi APBN yang diperoleh secara *realtime* melalui MONSAKTI. Proses digitalisasi diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses rekonsiliasi serta penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal serta memudahkan pengawasan/ *monitoring* dan pengendalian internal secara lebih dini.

Dampak/ Stakeholder

- Dapat melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam hal menganalisa hasil rekonsiliasi antara data SAI dan SiAP yang dilakukan pada MONSAKTI dan dapat dilakukan lebih cepat (*day to day*) karena SAKTI berinterface ke SPAN pada setiap siklus anggaran secara *realtime*
- Memudahkan dalam memonitoring proses penyusunan data laporan keuangan maupun laporan BMN secara *realtime* sehingga dapat mendukung analisa, perbaikan dan pengambilan keputusan
- *Stakeholder* pengguna MONSAKTI ini antara lain K/ L (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es 1, UAPA), APIP, BPK, Pembina KL baik BMN maupun Keuangan dan BUN

10. Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)



FKPKN adalah Wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi, supervisi dan sharing data informasi terkait lingkup pengelolaan keuangan negara dan regulasinya. FKPKN mendukung peran *Regional Chief Economist (RCE)* dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, mengharmonisasi kebijakan

pemerintah pusat dan daerah, memperkuat sinergi kelembagaan dan peran Kemenkeu di daerah, memberikan pendampingan dan asistensi

kepada pemerintah daerah, dan meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Keuangan Negara.

Dampak/ Stakeholder

- Unit Eselon I Kemenkeu
- Pemerintah Daerah
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Badan Pusat Statistik
- Bank Indoensia
- Otoritas Jasa Keuangan
- Perguruan Tinggi/Akademisi, Kementerian /Lembaga terkait lainnya.

11. Pengembangan *Treasury Big Data*



Pengembangan TBD (*Treasury Big Data*) adalah pembangunan sistem yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi data secara cepat dalam bentuk multidimensi berbasis *Online Analytical Processing* (OLAP).

Dampak

- TBD akan berdampak pada integrasi data sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat SITP guna membangun *single source of truth data*.

Stakeholder

- Seluruh Direktorat dan Kantor Wilayah DJPb
- Unit Eselon I Kemenkeu

12. Elektronifikasi Transaksi SAKTI



Penggunaan dokumen elektronik dalam penyampaian tagihan APBN secara non fisik melalui SAKTI dengan penggunaan *Digital Signature* dengan tujuan peningkatan akurasi dan akuntabilitas pembayaran APBN dan efisiensi pengajuan proses pembayaran

melalui penyampaian dokumen permintaan pembayaran dari pengguna anggaran kepada BUN secara *fully electronic* menggunakan SAKTI

Dampak

- Perbaikan operasional pelaksanaan pembayaran APBN sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab antara pengguna anggaran dan BUN

Stakeholder

- Seluruh satuan kerja pengguna SAKTI

Quickwins

2022



Automatic Business Intelligence Dashboard



Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum



Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)



Maturity Rating Sektur BLU



Dashboard Flash Report Transaksi BUN



Pengembangan Treasury Big Data



Dibahasai Bertuan Sosial melalui Persegiempat dan Rekanisasi Penjualan dan Penjualan Platform Digital



Early Warning System Pengukuran Kemampuan Bayar Untuk Membayar Pajak



Sinergi Pembinaan BLUD



Simplifikasi Rekonstruksi dengan MONSAKTI



Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)



Peningkatan Efektivitas Transaksi SAKTI

Bagian

4

DUTA TRANSFORMASI





APA ITU DUTA TRANSFORMASI?

Duta Transformasi adalah bagian dari manajemen perubahan, yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi Program RBTK Kementerian Keuangan.

i

Duta Transformasi bertugas membantu meyakinkan agar para pemangku kepentingan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan terlibat dan mendukung Program RBTK Kementerian Keuangan.

Mulai Tahun 2015, CTO Kementerian Keuangan menginisiasi dibentuknya Duta Transformasi Kementerian Keuangan yang berperan untuk membantu proses penyampaian informasi dan menggalang dukungan terhadap proses perubahan serta implementasi program Transformasi Kelembagaan.

Sebelum tahun 2022, Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tingkat Unit Eselon II ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang terdiri atas *Change Agent* dan *Lighthouse Team*. Sedangkan Duta Transformasi KPPN yang terdiri atas *Lighthouse Team* ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Tahun 2022 Seluruh Duta Transformasi yang terdiri atas *Change Agent* dan *Lighthouse* Ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK Nomor 112/KMK.01/2022 tentang Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2022.

Duta Transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022 berjumlah 274 Duta Transformasi yang terdiri atas:



42 *Change Agent*



232 *Lighthouse*

TUGAS DUTA TRANSFORMASI



Melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi yang ditetapkan oleh Tim RBTK Pusat (CTO)

Melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya perubahan dalam kaitannya dengan implementasi Program RBTK Kemenkeu di lingkungan kerja masing-masing



Mengumpulkan *feedback* terkait implementasi Program RBTK internal maupun eksternal

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan RBTK, baik yang diselenggarakan oleh CTO maupun PMO



Menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai Kemenkeu dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program RBTK Kemenkeu

Menjadi *role model* bagi pegawai di lingkungan Kemenkeu dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang semakin berfokus pada layanan pelanggan sebagai bentuk dukungan terhadap Program RBTK Kemenkeu dan menerapkan Nilai-nilai Kemenkeu, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil sebagai perwujudan budaya Kemenkeu.



PROGRAM KERJA DUTA TRANSFORMASI

Duta Transformasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki Program Kerja yang harus dilaksanakan. Program kerja Duta Transformasi setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda.

Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi tema RBTK terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan stakeholder terkait dimana yang bersangkutan ditugaskan.

Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022

Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022 terbagi menjadi 3 tema besar yang diantaranya adalah tema *mandatory* (wajib), *essential* (penting), dan *supplementary* (pengayaan) yang terbagi atas 4 tema kegiatan dan 10 Program Kerja.

Tema Besar	Tema Kegiatan	Bobot Nilai	
		Min	Max
Mandatory (Wajib)	Inisiatif Strategis Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (A1 & A2)	15%	15%
	Transformasi Digital Kementerian Keuangan (B)	5%	5%
	Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (C1 & C2)	50%	50%
Essential (Penting)	Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (C3 & C4)	20%	30%
Supplementary (Pengayaan)	Internalisasi Nilai-nilai, Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian Keuangan (D1, D2, D3)	10%	20%
Total Potensi Nilai		100%	120%

Duta Transformasi melaksanakan dua jenis Program Kerja yaitu umum dan khusus sebagai berikut:

1. Program Kerja Umum merujuk pada program kerja A1, A2, B, C3, C4, D1 dan D2
2. Program Kerja Khusus merujuk pada program kerja C1 dan C2

Bentuk Program Kerja umum antara lain:

1. mengikuti diklat/ program
2. menyelenggarakan *event*
3. membuat konten

Realisasi Program Kerja akan dilakukan penilaian oleh CTO, PMO, UIC, dan/ atau pihak Eksternal (Maksima Indonesia) dengan pemberian apresiasi oleh pimpinan diantaranya adalah perjalanan dinas dalam rangka *Capacity Building* (dalam/luar negeri), management talenta, dan ditetapkan dalam KMK Duta Transformasi Terbaik.



KLIK DI SINI



Untuk pelaporan pelaksanaan program kerja

Mandatory (70 %)

Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu Tahun 2022

1. Penguatan Budaya Kemenkeu
2. Sinergi Pemberdayaan UMKM
3. Kemenkeu Kewilayahan (*Regional Chief Economist*)

Hot Topics Kemenkeu

1. Digital dan IT Security Awareness
2. Pemanfaatan Data



Essential (20 %)



Penguatan Budaya Kemenkeu

- a. Budaya Kerja dan Nilai-Nilai: Kode Etik, Kode Perilaku, dan Integritas
- b. Budaya Pemanfaatan Data

Internalisasi dan Sosialisasi IS dan RBTK Kemenkeu

DJPb



Platform Pembayaran Pemerintah

Supplementary (10 %)

Penguatan Budaya Kemenkeu

Sesuai dengan arahan pimpinan yang bersifat insidental.



1. Inisiatif Strategis Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (Tema Mandatory)

Tema Kegiatan	Inisiatif Strategis Penguatan Budaya Kementerian Keuangan	
A	A1	A2
Tujuan Program	Memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan implementasi Inisiatif Strategis Penguatan Budaya Kementerian Keuangan yakni terwujudnya budaya kerja Kemenkeu Satu yang kolaboratif dan berbasis digital guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan	
Program Kerja	Mengikuti kegiatan pembekalan (<i>Workshop/ PJJ/ e-learning</i>) terkait nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan	Menyelenggarakan kegiatan/ project internalisasi nilai-nilai dan/ atau penguatan budaya Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut kegiatan pembekalan
Output / Kriteria Penyelesaian	Dokumentasi/ laporan singkat atas partisipasi dalam kegiatan pembekalan dimaksud	Laporan implementasi kegiatan/ <i>project</i> dari pimpinan UE II/ setara kepada Ses UE I/ setara
Enabler	BPPK dan Biro SDM	Biro SDM, PMO, dan Unit Eselon II/ setara
Frekuensi	1	1
Bobot Nilai	5%	10%

Pelaksanaan Program Kerja A1:

Workshop/ PJJ/ e-learning akan diadakan oleh Biro SDM Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan Program Kerja A2:

Menyelenggarakan *Workshop/ FGD* terkait nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan sesuai dengan arahan pada Program kerja A1.

2. Transformasi Digital Kementerian Keuangan (Tema Mandatory)

Tema Kegiatan	Transformasi Digital Kementerian Keuangan
B	B
Tujuan Program	Mewujudkan Kemenkeu 4.0 melalui pemanfaatan teknologi digital dan data analitik (DA) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas, dan kualitas output individu maupun organisasi
Program Kerja	Mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengolahan data/ data analitik
Output / Kriteria Penyelesaian	Keikutsertaan dalam diklat/ PJJ/ <i>workshop</i> / pelatihan pengolahan data/ data analitik
Enabler	BPPK, CTO, penyelenggara diklat
Frekuensi	1
Bobot Nilai	5%

Contoh pelaksanaan Program Kerja B

1. Pelatihan Teknologi dan Informasi Komunikasi DJPb
2. Pelatihan data *analytics* DJPb
3. Mengikuti lomba data *analytic* yang diadakan oleh DJPb (DJPb *Data Analytic Competition*)

NB: Pelaksanaan Program Kerja B **Wajib** dilakukan oleh Duta Transformasi (*Lighthouse Team/ Change Agent*)

3. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (Tema Mandatory)

Tema Kegiatan	Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2022	
C	C1	C2
Tujuan Program	Duta Transformasi berperan mensosialisasikan, membantu terlaksananya proses perubahan, mengumpulkan umpan balik (<i>feedbacks</i>), berpartisipasi aktif, dan sebagai forum penghubung antara CTO-PMO-pegawai Kemenkeu dalam kaitannya dengan isu dan inisiatif strategis Kementerian Keuangan	
Program Kerja	Duta Transformasi menyusun proposal rencana kerja/ project dan mengimplementasikannya atas 5 topik (pilih salah satu), yaitu: 1. Penguatan Budaya Kemenkeu 2. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu 3. Peningkatan Peran Fiskal Kemenkeu di Wilayah (RCE/ Non-UMKM) 4. Pemanfaatan Data Kemenkeu 5. Digital dan IT <i>Security Awareness</i>	
Output / Kriteria Penyelesaian	Menyusun proposal/ rencana kerja <i>project</i> perubahan	Menyampaikan laporan penyelesaian/ <i>progres project</i> perubahan
Enabler	Set UE I/ setara, UE II PIC Isu/ Inisiatif Strategis Kemenkeu, PMO, dan CTO	
Frekuensi	1	1
Bobot Nilai	15%	35%

Pelaksanaan Program Kerja C

Dalam menjalankan Program Kerja khusus (C1 & C2), tim Duta Transformasi menyusun proposal Program Kerja dan mengimplementasikannya berdasarkan 5 topik yang ada (pilih salah satu)

Template Proposal: <https://bit.ly/TemplateProposalDutrans>

Tautan Pengumpulan Proposal: <https://bit.ly/UploadProposalDutrans>

NB: Contoh Proposal terdapat pada bagian Suplemen

Linimasa Program Kerja C

April - Mei

Pembekalan Program

Pengayaan materi manajemen perubahan dan sesi fasilitasi penulisan proposal program kerja inisiatif strategis.

17 - 31 Mei

Penulisan Proposal

Penulisan proposal berdasarkan panduan yang diberikan. Setiap tim mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari draft proposal sebelum dikumpulkan.

Juni -
September

Implementasi dan Monitoring

Selama program pelaksanaan program kerja, akan ada 1x mentoring terkait studi kasus dan 1x pengayaan materi. Secara paralel, akan diselenggarakan proses monitoring & evaluasi.

Oktober

Laporan

Pembuatan laporan ketercapaian masing-masing program kerja.

4. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (Tema Essentials)

Tema Kegiatan	Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan	
C	C3	C4
Tujuan Program	Duta Transformasi berperan mensosialisasikan, membantu terlaksananya proses perubahan, mengumpulkan umpan balik (<i>feedbacks</i>), berpartisipasi aktif, dan sebagai forum penghubung antara CTO-PMO-pegawai Kemenkeu dalam kaitannya dengan isu dan inisiatif strategis Kementerian Keuangan	
Program Kerja	<p>Duta Transformasi sebagai fasilitator/kolaborator dalam internalisasi berbagai isu dan inisiatif strategis Kementerian Keuangan melalui penyelenggaraan kegiatan baik offline ataupun online lingkup UE II/setara dan/atau lintas UE / tim Duta Transformasi dengan opsi tema, antara lain: Integritas dan anti korupsi; Inisiatif Strategis Platform Pembayaran Pemerintah (DJPb).</p> <p>*Tim Duta Transformasi yang berasal dari UE I di atas wajib memilih dan melaksanakan opsi tema berkenaan</p>	<p>Menyusun, membuat, dan mempromosikan melalui media sosial terkait update maupun konten opsi tema, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Umum: IS Kemenkeu Tahun 2022; Work-life Integration; Integritas, Anti Korupsi, Kode Etik, dan Kode Perilaku; Pemanfaatan Data; Office Automation; Transformasi Digital; dan/atau Isu Strategis dari Biro KLI (<i>Employee Advocacy</i>) DJPb: Inisiatif Strategis Platform Pembayaran Pemerintah. <p>*Tim Duta Transformasi yang berasal dari UE I di atas wajib memilih dan melaksanakan opsi tema berkenaan</p>
Output/ Kriteria Penyelesaian	Dokumentasi dan/ atau laporan singkat atas pelaksanaan kegiatan dalam bentuk IHT, webinar, FGD, atau <i>sharing knowledge</i> . Poster/ <i>flyer digital</i> di tag pada akun PMO, CTO, dan UE I/ setara	Posting Gambar/ Infografis/ Video/ Podcast pada media sosial unit dan/ atau Duta Transformasi dengan men-tag akun PMO, CTO, dan UE I/ setara
Enabler	Set UE I/ setara, PMO, dan CTO	
Frekuensi	2	4
Bobot Nilai	20%	10%

Contoh pelaksanaan Program Kerja C3

1. Kegiatan *Monday Morning* atau *sharing knowledge* dengan tema Integritas dan Anti Korupsi.
2. Mengadakan FGD pada grup WA pegawai membahas isu terkini terkait integritas dan Anti Korupsi.
3. Membuat poster terkait pentingnya Integritas dan Anti Korupsi atau Platform Pembayaran Pemerintah.

Contoh pelaksanaan Program Kerja C4

1. Kegiatan *Capacity Building* bersama.
2. Pembuatan tempat sampah bertuliskan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.
3. Pembuatan tangga informasi bertuliskan *quotes* anti korupsi.
4. Penamaan ruang dalam kantor dengan nama-nama Pegawai *role model* anti korupsi.
5. Mengadakan FGD terkait tema kemudian diposting pada media sosial milik instansi masing-masing.
6. Mengikuti *e-learning* Platform Pembayaran Pemerintah

5. Internalisasi Nilai-nilai, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian Keuangan (Tema Supplementary)

Tema Kegiatan	Internalisasi Nilai-nilai, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian Keuangan		
D	D1	D2	D3
Tujuan Program	Duta Transformasi menjadi panutan (role model) bagi pegawai di lingkungan Kemenkeu dengan menerapkan Nilai-Nilai, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kemenkeu		
Program Kerja	Memelihara dan meningkatkan budaya integritas unit kerja melalui dukungan dan pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) tersertifikasi di unit Eselon II/setara terkait		

Output / Kriteria Penyelesaian	Mengikuti Diklat/ PJJ/ e-learning Penyuluh Anti Korupsi di BPPK atau KPK	Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai dengan sertifikat PAKSI baik dari jalur pengalaman ataupun diklat di KPK/ PKN STAN pada unit Eselon II/ setara terkait	Kegiatan kolaboratif dalam bentuk webinar, FGD, <i>joint content</i> (misal: Podcast), antara Duta Transformasi dengan PAKSI Kementerian Keuangan
Enabler	PKN STAN, IBI, unit Eselon II/ setara, dan Komunitas PAKSI Kemenkeu		
Frekuensi	1	1	1
Bobot Nilai	5%	5%	10%

Pelaksanaan Program Kerja D1

Mengikuti diklat/ PJJ/ *e-learning*/ seminar Anti Korupsi di BPPK/ Biro SDM/ KPK.

Pelaksanaan Program Kerja D2

Tindak lanjut dari pegawai yang melaksanakan Program Kerja D1 dan mendapat sertifikat PAKSI.

Sertifikat PAKSI dapat diunggah pada form laporan capaian.

Pelaksanaan Program Kerja D3

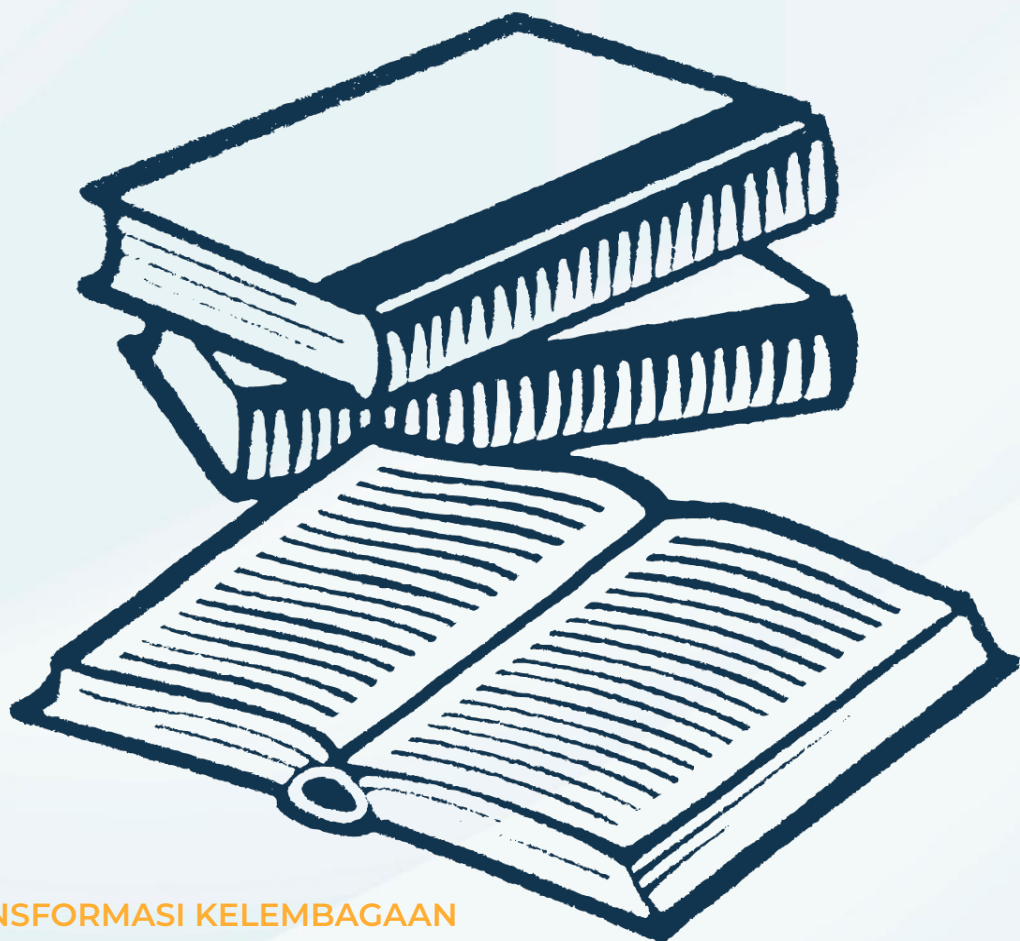
Tindak lanjut dari pegawai yang melaksanakan Program Kerja D1 untuk melaksanakan *joint content* bersama PAKSI Kementerian Keuangan seperti:

- Live Instagram
- Podcast
- Webinar
- Bincang santai/sarasehan

Bagian

5

SUPLEMEN



SUPLEMEN

Proposal Program Kerja

Tahap Pembuatan Proposal

Identifikasi Masalah	Perumusan Tujuan	Operasionalisasi perencanaan
<p>Memilih isu kunci yang ingin diintervensi dalam inisiatif strategis</p> <p>Melakukan brainstorming problem dalam lingkup tema yang dipilih, klasterisasi hingga validasi akar masalah</p>	<p>Menentukan arah ideal (<i>end state</i>) perubahan yang diinginkan</p> <p>Menentukan tujuan spesifik perubahan yang diinginkan, dan indikator terukur sebagai acuan evaluasi proyek</p>	<p>Perencanaan eksekusi dan mekanisme evaluasi</p> <p>Pembagian tugas dan penjadwalan kegiatan, dan perencanaan monitoring & evaluasi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan Kunci Apakah rumusan masalah sudah cukup jelas? Bagaimana keterkaitan masalah dengan tema transformasi Kemenkeu secara umum? • Aspek Penilaian Relevansi, Originalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan Kunci Apa saja hasil dan luaran yang ingin dicapai dari inisiatif? Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai kesuksesan inisiatif? • Aspek Penilaian Dampak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan Kunci Apakah mekanisme kerja dan alokasi sumber daya sudah tepat? Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi proyek? • Aspek Penilaian Sinergi dan Kolaborasi, Implementatif

Struktur Proposal

No	Judul	Deskripsi
1.	Abstrak	Ringkasan singkat yang menjelaskan inisiatif strategis
2.	Rumusan Masalah	Uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diangkat, serta gambaran visi perubahan yang diinginkan
3.	Tujuan	Deskripsi dampak, hasil dan luaran yang diharapkan
4.	Strategi Implementasi	Penjelasan terkait pendekatan dan solusi yang akan dilakukan
5.	Rancangan Kegiatan	Rangkaian waktu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Juni - September 2022) beserta daftar aktivitas dan pembagian tugas Duta Transformasi
6.	Manajemen Risiko & Monitoring & Evaluasi	Identifikasi risiko kegagalan ataupun kemungkinan tidak sesuai rencana implementasi inisiatif, dan penjelasan rencana evaluasi

1. Abstrak/ Ringkasan

Abstrak adalah versi ringkas penjelasan inisiatif strategis. Abstrak membantu orang lain memahami apa yang kita akan lakukan; alasan, tujuan dan bagaimana kita menjalankan inisiatif.

Anda bisa menggunakan rujukan metode 5w 1h (*what, who, where, when, why, how*) dalam membuat narasi abstrak. Idealnya Anda cukup menuliskan dalam 1 paragraf (200-250 kata)

Contoh Abstrak

Isu pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan isu sentral dalam wacana program revitalisasi ekonomi pasca pandemi Covid19. Hal ini sejalan dengan mandat Kemenkeu tahun 2022 dari Presiden untuk fokus program membantu UMKM. Sebagai unit yang langsung berhubungan dengan business process perdagangan ekspor impor, Unit Bea Cukai Wilayah Bali memiliki inisiatif program edukasi regulasi dan tata cara perdagangan luar negeri untuk UMKM yang berbasis di kawasan Bali. Hal ini dilakukan karena berdasarkan data dari KADIN Bali, banyak UMKM potensial tidak mengetahui proses dan aturan dalam melakukan perdagangan luar negeri.

Program yang dinamakan “Bali Bangkit!” ini menysasar UMKM bidang fashion, kuliner dan agribisnis yang selama ini tercatat memiliki frekuensi aktif dalam perdagangan luar negeri. Dalam rentang waktu 3 bulan ke depan, tim akan melakukan kegiatan sosialisasi dan 3x sesi pendampingan kepada 100 UMKM, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata-UMKM. Akan ada 3 sub tim yang terlibat dalam eksekusi program ini: tim kepesertaan, tim substansi modul dan tim pengajar. Proses edukasi dan sosialisasi akan berlangsung secara hybrid (offline-online). Program ini diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan luar negeri dan frekuensi UMKM hingga 10% dari total nilai perdagangan pada kuartal sebelumnya. Harapannya, program ini akan dapat menginspirasi kanwil lain di seluruh Indonesia untuk mendorong inisiatif yang serupa untuk membantu membangkitkan perekonomian Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah, merupakan cara kita mengkomunikasikan isu yang hendak diselesaikan, dengan cara yang padat namun detail - agar memberikan pemahaman yang komprehensif.

Rumusan masalah yang tepat akan membantu memberikan arah dan fokus pengembangan solusi serta membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam proses eksekusi inisiatif.

Beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam perumusan masalah inisiatif perubahan:

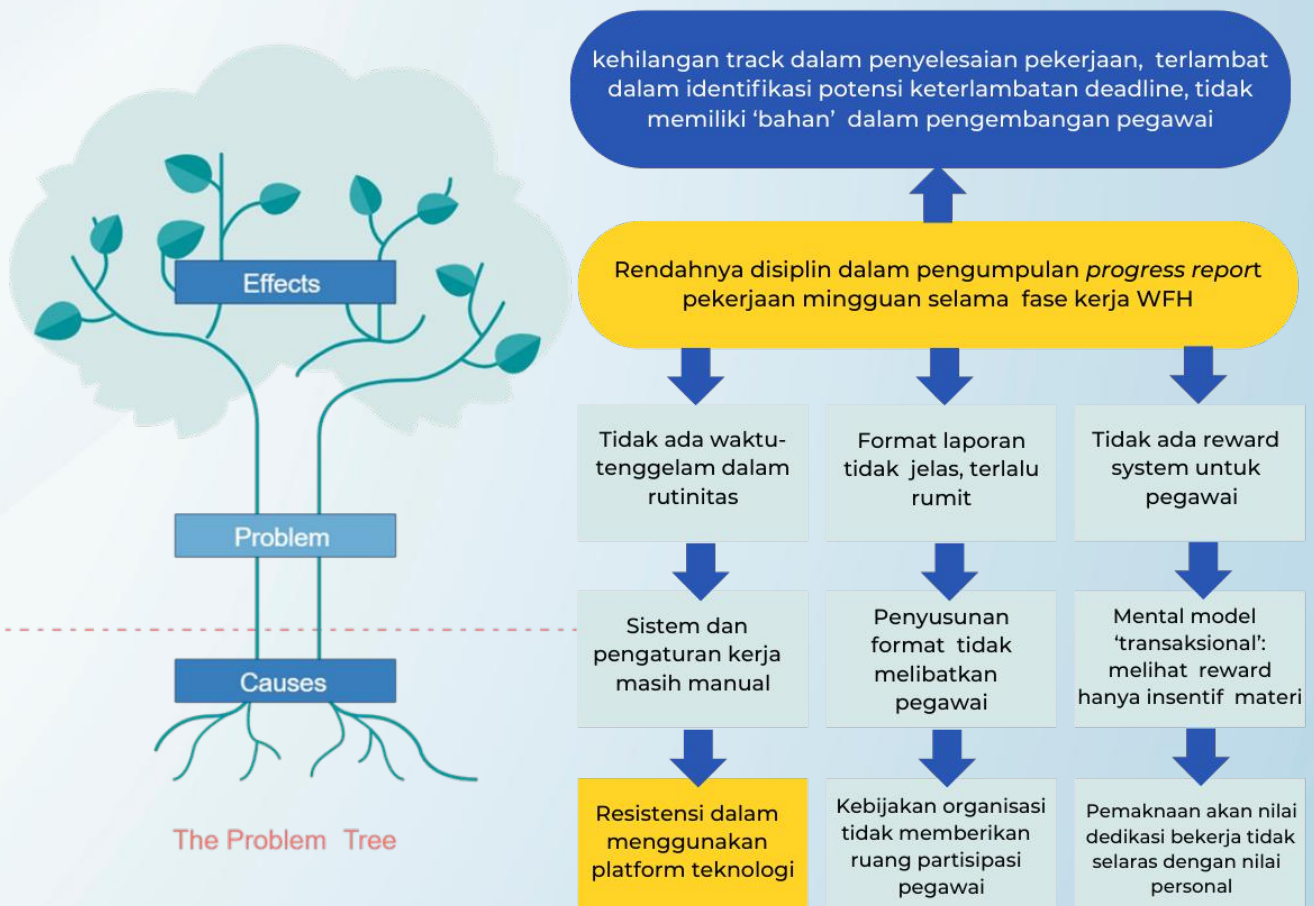
- terlalu general
- mengandung solusi
- tidak berlandaskan pada fakta (hanya mengandalkan asumsi)

Contoh Rumusan Masalah

Rumusan Masalah	Rendahnya indeks kepuasan kerja (dibawah 75%) pegawai Unit Kantor Pajak Kota X yang berusia 25-30 tahun.
Latar Belakang	Pada akhir tahun 2021, biro SDM mengadakan survey kepuasan kerja pada seluruh pegawai kantor Pajak Kota X. Survey dilakukan dalam populasi, dan diisi oleh 90% seluruh pegawai. Dalam paparan hasil survey kepada seluruh pegawai pada rapat awal tahun, ditemukan fakta mengenai rendahnya indeks kepuasan kerja pada pegawai cohort generasi millennial. Hal ini berbanding terbalik dengan indeks kepuasan kerja dengan
Relevansi	Mayoritas pegawai di kantor pajak Kota X adalah generasi milenial. Saat ini, sebagian besar mereka berada di posisi frontline, yang langsung berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat. Adanya temuan hasil survey internal memberikan kekhawatiran akan adanya pengaruh pada penurunan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan semangat service excellence yang menjadi tema transformasi Kemenkeu tahun 2022.

Referensi tools: Problem-Tree Analysis

Analisis pohon masalah (juga disebut Analisis situasional atau Analisis masalah) membantu menemukan solusi dengan memetakan anatomi sebab dan akibat di sekitar suatu masalah dengan cara yang mirip dengan Peta Pikiran, dengan menggunakan struktur.



3. Tujuan

Tujuan merupakan representasi dari visi (arah) perubahan yang ingin dicapai. Tujuan akan membuat kita mengetahui dengan jelas perbedaan antara kondisi sebelum dengan sesudah perubahan.

Umumnya program perubahan hanya fokus di luaran, namun melupakan apa esensi perubahan yang ingin dicapai.

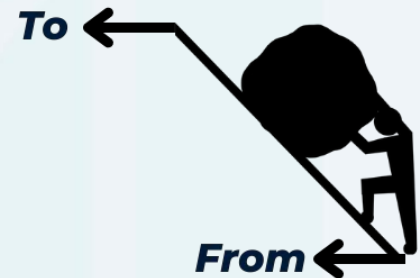
Tujuan yang tepat akan membantu kita mengalokasikan sumber daya dengan tepat.

Referensi Tools: From to Chart Analysis

From to Chart *analysis* merupakan salah satu teknik *brainstorming* yang dapat digunakan secara umum dalam mengidentifikasi harapan/persepsi perubahan yang ingin dicapai.

Duta Transformasi dapat melakukan diskusi dalam menggali *ideal state* (tujuan akhir perubahan) dari masing-masing anggota dengan melakukan *exercise* ini.

Akar Masalah	From (Kondisi Aktual)	To (Kondisi Ideal)
Resistensi dalam menggunakan platform teknologi	Persepsi ketakutan akan gagal beradaptasi	Optimisme dalam adaptasi model baru dalam cara kerja



Kaidah SMART

Meningkatkan budaya disiplin laporan kerja mingguan dengan persentase tepat waktu 75% pada unit Kantor Wilayah Jakarta 1 selama periode bulan Juni-Agustus 2022.

Aspek	Keterangan
<i>Spesifik</i>	Kelompok menentukan target hasil yang spesifik terkait dengan luaran yang dilakukan
<i>Measurable</i>	Kelompok membuat tujuan yang dapat terukur secara kuantitatif mengenai apa yang akan dicapai
<i>Achievable</i>	Kelompok menentukan tujuan yang dapat dicapai dan realistis dalam rentang waktu program
<i>Relevant</i>	Kelompok membuat target yang relevan dengan tema yang diambil
<i>Time Bound</i>	Kelompok menentukan skema waktu yang spesifik dalam menentukan sasaran yang akan dilakukan

Tujuan	
Hasil	Luaran
<i>Meningkatkan budaya disiplin laporan kerja mingguan dengan persentase tepat waktu 75% pada unit Kantor Wilayah Jakarta 1 selama periode bulan Juni-Agustus 2022</i>	Penyusunan format laporan yang reliable dan simple
	Sosialisasi sistem pelaporan
	Penyiapan reward system untuk pegawai

4. Strategi Implementasi

- ▶ Strategi implementasi menjelaskan mengenai pendekatan (*way of work*) dan penjelasan solusi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan.
- ▶ Strategi implementasi merupakan hasil kesepakatan bersama di internal tim yang mengoptimalkan semua cara yang mungkin dilakukan.
- ▶ Strategi terbaik adalah memilih untuk tidak melakukan semuanya, hanya fokus pada opsi solusi yang efektif.

Referensi Tools: Six Thinking Hats



contoh bagan 6 Topi Berpikir

Six Thinking Hats atau 6 Topi Berpikir bekerja berdasarkan prinsip *parallel thinking process*, yaitu proses berpikir yang menempatkan setiap sudut pandang atau pendapat seseorang, paralel (sejajar) dengan sudut pandang atau pendapat yang lainnya. Tools ini dapat digunakan untuk pengembangan solusi.

5. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan adalah perencanaan sistematis yang dibuat oleh Duta Transformasi dalam rangka melakukan inisiatif program perubahan. Rancangan kegiatan ini diturunkan dari opsi solusi/kegiatan yang disepakati bersama.

Rancangan kegiatan menjelaskan tidak hanya rentang waktu pelaksanaan dari setiap aktivitas kunci, namun juga menjelaskan pembagian tugas.

Referensi tools: GANTT CHART

Kegiatan	Juni	Juli	Agustus	September
Perencanaan				
Riset				
Implementasi kegiatan				
Monitoring & evaluasi kegiatan				

contoh GANTT CHART

Referensi tools: RACI MATRIX

RACI adalah diagram atau bagan yang menunjukkan daftar tugas proyek Anda dan orang yang Bertanggung Jawab (*Responsibility*), Akuntabilitas (*Accountability*), Dikonsultasikan (*Consulted*), atau Diinformasikan untuk setiap tugas (*Inform*).

Aktivitas Kunci	R	A	C	I
Aktivitas 1	Ivan	Amel	Budi	Bambang
Aktivitas 2				
Aktivitas 3				

contoh RACI Matrix

6. Manajemen Risiko dan Monitoring Evaluasi

Dalam perencanaan terbaik, program perubahan juga mengidentifikasi risiko-risiko apa yang muncul dalam pelaksanaan inisiatif. Hal ini agar seluruh tim waspada akan faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam mengukur alokasi waktu dan pembagian tugas.

Dalam implementasi inisiatif, tim juga perlu menyiapkan kerangka atau rencana untuk melakukan monitoring proses dan juga metode yang digunakan untuk bisa mengukur capaian hasil dan proses yang dilakukan.

FAQ

Q: Apakah dasar hukum pelaksanaan kegiatan Duta Transformasi Kementerian Keuangan 2022?

A: Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 112/KMK.01/2021 tentang Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2022.

Q: Apabila terdapat perubahan nama Duta Transformasi karena manajemen kepegawaian, antara lain namun tidak terbatas pada mutasi/ promosi/masa kerja berakhir, yang berpengaruh terhadap kedudukan Duta Transformasi, bagaimana ketentuannya?

A: Sesuai KAK, pergantian Duta Transformasi yang terjadi sampai dengan triwulan III dapat diusulkan oleh UE II/setara melalui PMO UE I kepada CTO untuk bahan penyusunan KMK perubahan pada awal triwulan IV. Untuk perubahan yang terjadi setelah triwulan III, diadministrasikan oleh PMO UE I sebagai bahan pertimbangan kinerja individu Duta Transformasi yang bersangkutan maupun tim Duta Transformasi UE II/setara terkait.

Q: Duta Transformasi melekat ke nama pegawai atau nama jabatan? Jika sudah berganti jabatan, apakah pejabat baru otomatis jadi Duta pengganti? Bagaimana status Duta untuk pejabat yang berpindah unit?

A: Duta Transformasi melekat pada nama pegawai sepanjang mutasi/ promo terjadi di lingkup UE II. Apabila DT berganti nama, jabatan, dan UE II, maka penunjukan Duta pengganti sebagaimana penjelasan di atas.

Q: Bagaimana mekanisme pelaporan Program Kerja Duta Transformasi?

A: Pengisian laporan dapat dilakukan secara berkala atau sepanjang masa penugasan sebagai Duta Transformasi melalui <https://linktr.ee/duta.transformasi.2022> (pada "form laporan capaian duta transformasi"). Namun sekurang-kurangnya pengisian laporan

dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada akhir semester I dan semester II tahun 2022.

Q: Bagaimana cara agar memperoleh akses *spreadsheet* laporan Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022 apabila ada pergantian Duta Transformasi?

A: Untuk meminta *request access* dapat dilakukan dengan cara:

1. Melalui <https://linktr.ee/duta.transformasi.2022> pada “form akses laporan capaian duta transformasi”.
2. Setelah mengisi form tersebut dapat di *screenshot*/tangkap layar terlebih dahulu sebelum klik kirim, agar dapat diteruskan ke CTO

Q: Terkait *timeline* program kerja A, apakah sudah terdapat informasinya?

A: Program kerja A masih menunggu undangan dari BPPK dan Biro SDM Kementerian Keuangan dengan mengundang seluruh Duta Transformasi.

Q: Terkait program kerja B apakah yang mengikuti diklat/*workshop* harus *Change Agent / Lighthouse* atau bisa diikuti oleh pegawai lain?

A: Untuk program kerja B harus diikuti oleh Duta Transformasi baik *Change Agent* maupun *Lighthouse*. Karena dari pihak CTO tidak memberikan set khusus terkait jenis materi/diklat *Data Analytic*.

Q: Untuk program kerja B apakah masih menunggu diklat dari penyelenggara?

A: Terkait program kerja B dapat menyesuaikan dengan penyelenggara diklat, bisa dari BPPK/CTO. Diklat yang diadakan BPPK terkait *Data Analytic* dapat dilihat di Semantik.

Q: Dimana letak upload bukti laporan untuk program kerja C3?

A: Bukti laporan program kerja kegiatan C3 dapat diisi di *sheet* keg. C3-C4 pada kolom bukti dukung.

Q: Terkait program kerja D masih menunggu info kapan ada kegiatan seminar/PJJ/Diklat dari BPPK/Biro SDM/KPK?

A: Untuk program kerja D1 (diklat anti korupsi) sedang dikoordinasikan dengan BPK/KPK.


Daftar Pustaka

- CTO Kementerian Keuangan. (2022). *Panduan Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022*.
- CTO Kementerian Keuangan. (2022). *Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2022*.
- CTO Kementerian Keuangan. (2022). *Selayang Pandang IS Kemenkeu*.
- CTO Kementerian Keuangan. (2022). *Tata Kelola IS Kemenkeu For Dummies*.
- Kasali, Rhenald. (2022). *Duta Transformasi sebagai Titik Penyebaran*. [Presentasi PowerPoint]
- CTO Kementerian Keuangan. (2022). *Template Proposal Proyek Duta Transformasi* [Presentasi PowerPoint].
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2022 tentang *Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang *Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2022*.
- PMO DJPb. (2021). *Handbook Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2021*. [Presentasi PowerPoint].
- PMO DJPb. (2022). *Intimacy Duta Transformasi Kelembagaan* [Presentasi PowerPoint].
- PMO DJPb. (2022). *Pekan Duta Transformasi* [Presentasi PowerPoint].
- PMO DJPb. (2022). *Sewindu Quickwins Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- PMO DJPb. (2022). *Quickwins DJPb 2022* [Presentasi PowerPoint].
- PMO DJPb. (2015). *Laporan Tahunan Project Management Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015: Pasti Lebih Baik*.



“Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kalian wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri dan jadilah *role models* di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Sebab mustahil mengharapkan datangnya perubahan di dalam sebuah lingkungan, jika diri kalian sendiri saja tidak pernah melakukan perubahan”

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan

 0856-9147-1761 (Hotline PMO DJPb)

 pmodjpb

 Project Management Office - PMO DJPb

 Project Management Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan - PMO DJPb